



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07692.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA HARAPAN CEMERLANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris VINCENTIUS JOKO ARYANTO YEO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 07 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA HARAPAN CEMERLANG tanggal 15 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014101561100719 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA HARAPAN CEMERLANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PELITA HARAPAN CEMERLANG
berkedudukan di KOTA PONTIANAK, sesuai dengan Akta Nomor 13 Tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris VINCENTIUS JOKO ARYANTO YEO, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PONTIANAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hain

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007685.50.80.2014 TANGGAL 15 Oktober 2014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 743 TAHUN 2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PELITA CEMERLANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah - langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - c. Bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Oprasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah - daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga negara republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

- Memperhatikan :
1. permohonan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas dari pengurus Yayasan SMA PELITA CEMERLANG Kabupaten/Kota Pontianak, melalui surat Nomor : 003/YPHC/VIII/2017 Tanggal 5 April 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
 2. hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari senin tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Atas PELITA CEMERLANG Kabupaten/Kota Pontianak telah memenuhi syarat;
 3. adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun organisasi masyarakat;
 4. akta notaris Nomor 13 tentang pendirian Yayasan Pelita Harapan Cemerlang tanggal 07 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN

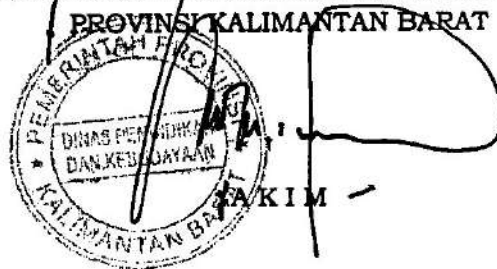
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta:
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA PELITA CEMERLANG
 2. Alamat : Jln. Perdana No.8, Pontianak
- KEDUA** : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan keputusan yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA** : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 10 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pontianak;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;